

DISPARITAS DAN SPESIALISASI INDUSTRI MANUFAKTUR KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH

Kusumantoro

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
email; paktoro@plasa.com

ABSTRACT

The aim of this research is measure disparity and identification of specialization industry in the local region of central java province. This research use the local government data from BPS (Badan Pusat Statistik) from 2001 until 2006. Analisis of this research is index theil and regional specialization Index. The result of manufacture industry disparity in local government central java province show different level in the Theil entropy index. Identification result of local industry in the central java province show that industry activity is food industry (ISIC 15), garment Industry (ISIC 17), Manufacture industry (ISIC 20) and chemical industry (ISIC 24). The specialization in the same area, usually have the same industry. Semarang region (Semarang and kudus) is specilized in garment industry (ISIC 18) and publiser (ISIC 22). Surakarta region (Sukoharjo and Karanganyar) is textile, garment and chemical specialization industry (ISIC 24)

Keywords: *disparity, industry specialized, Index Theil.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam konteks regional (tata ruang atau spasial), pada dasarnya sama dengan pembangunan nasional secara keseluruhan. Inti dari pembangunan regional maupun nasional adalah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan dan sebagainya. Pokok permasalahan tersebut dapat dipecahkan melalui proses pembangunan dengan menentukan tingkat-tingkat tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Apabila pembangunan secara regional tersebut rata-rata baik, maka pembangunan dalam tingkat nasional juga baik, maka indikator tersebut merupakan dasar pangkal tolak dalam rangka menyusun skala prioritas kebijakan ekonomi nasional.

Dalam rangka mengembangkan potensi daerah, maka daerah harus mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai dengan keunggulannya. Pengembangan sektor unggulan ini diharapkan bahwa sektor tersebut dapat menjadi produk yang menghasilkan keuntungan yang tinggi karena sektor tersebut biasanya mempunyai permintaan pada tingkat nasional atau permintaan ekspor yang tinggi. Daya saing suatu daerah akan terlihat melalui proses perdagangan antar daerah (inter-regional) maupun internasional. Kemudian dalam jangka panjang,

diharapkan sektor-sektor yang memiliki daya saing yang tinggi akan menjadi spesialisasi daerah.

Kebijakan pembangunan sektoral yang strategis adalah kebijakan pembangunan di sektor industri. Bahkan secara umum dapat dinyatakan bahwa hampir semua propinsi cenderung mengutamakan sektor industri. Sektor ini dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas tinggi, sehingga dengan keunggulannya akan didapat nilai tambah tinggi. Oleh karena itu, tujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat lebih cepat terwujud dengan mengembangkan sektor ini. Sektor industri yang dipandang strategis adalah industri manufaktur, di mana industri tersebut dipandang sebagai pendorong atau penggerak utama perekonomian daerah. Sektor manufaktur menjadi media untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah sehingga akan menyerap tenaga kerja yang besar.

Berdasarkan kontribusinya kepada PDRB, sektor industri di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang baik. Namun tidak semua kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah mempunyai kondisi tersebut. Dilihat dari distribusi tenaga kerja dan nilai tambah, hanya kabupaten/kota tertentu yang mendominasi yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten Karanganyar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kuncoro (2002) bahwa di Jawa Tengah konsentrasi spasial industri hanya ada di daerah Semarang dan sekitarnya yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus dan Surakarta sekitarnya yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo. Kenyataan diatas menunjukkan masih adanya disparitas atau ketidakmerataan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Analisis disparitas ini dianggap penting karena dengan analisis ini dapat diketahui seberapa besar tingkat pembangunan yang telah dicapai. Di samping itu, dengan analisis disparitas dapat mengetahui perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah, sehingga dapat diketahui daerah yang sudah berkembang dan daerah yang belum berkembang. Maka dari itu dapat dicari solusi atau upaya pengembangan daerah yang dianggap masih kurang berkembang.

Upaya mengembangkan ekonomi daerah khususnya sektor industri dapat dilakukan dengan mengetahui spesialisasi industri manufaktur daerah. Spesialisasi industri manufaktur daerah yang tumbuh atau berbentuk dari daya saing yang tinggi akan menyebabkan berkembangnya sektor tersebut. Pertumbuhan sektor spesialisasi menyebabkan output yang semakin tinggi dan kesempatan kerja yang semakin luas. Apabila hal tersebut terus berlangsung, maka dengan sendirinya tujuan pembangunan regional dan nasional akan tercapai. Spesialisasi industri manufaktur pada umumnya berkaitan dengan keunggulan komparatif daerah di dalam biaya produksinya. Penentu ongkos produksi tidak lain adalah harga input yang digunakan dalam proses industri. Maka suatu daerah akan berspesialisasi pada suatu industri dimana harga input lebih rendah. Oleh karena itu, sumber daya yang ada di daerah akan sangat menentukan spesialisasi tersebut, apakah menghasilkan yang berbasis sumber daya alam, kapital, sumber daya manusia dan teknologi.

LANDASAN TEORI

Teori Pembangunan Ekonomi Regional

Perbedaan sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah menyebabkan tingkat pem-

angunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Sebagai akibatnya akan timbul perbedaan kesejahteraan di berbagai daerah. Perbedaan kesejahteraan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu terdapat perbedaan kesejahteraan yang tidak begitu nyata atau tidak mencolok di kedua atau berbagai daerah. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa dalam suatu wilayah pendapatan masing-masing daerah atau tingkat kesejahteraan antar daerah sangat berbeda sekali. Dengan adanya perbedaan tingkat pembangunan antara daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, sehingga apabila hal ini tidak diperhatikan akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu wilayah/negara.

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti terjadi di setiap wilayah. Hal ini terjadi karena perbedaan sumber daya yang dimiliki antar daerah. Namun yang terpenting adalah adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam suatu wilayah. Bertitik tolak dari kenyataan itu, Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan/kesenjangan antar daerah merupakan konsekuensi logis dari pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Ketimpangan Regional

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, tetapi juga terjadi di daerah lain. Berbagai program telah dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah yang sudah dilakukan, namun belum mencapai hasil yang optimal. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan lagi di masa mendatang.

Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan atau ketimpangan regional. Ketimpangan ini disebabkan oleh ketidakmerataan anugerah awal diantara

pelaku-pelaku ekonomi dan pelaksanaan pembangunan yang lebih bertumpu pada aspek pertumbuhan (Dumairy, 1996:66).

Dengan kata lain, sumber daya alam yang dimiliki antar daerah misalnya modal, keahlian/ketrampilan, teknologi, bakat atau potensi antar daerah tidak sama. Ketidaksetaraan anugerah awal dapat berakibat pada pembangunan menjadi tidak seimbang di mana ada pelaku ekonomi yang tumbuh cepat dalam pembangunan dan ada pelaku ekonomi yang lambat dalam pembangunan. Hal ini merupakan permasalahan yang pada gilirannya timbul masalah ketimpangan di berbagai aspek terutama ketimpangan regional.

Ukuran Ketimpangan Regional

a. Indeks Williamson:

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i/n}{Y}}$$

Keterangan :

- V_w = Indeks Ketimpangan Regional Williamson
- Y_i = Pendapatan perkapita di daerah i
- Y = Pendapatan perkapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = Jumlah penduduk di daerah i
- n = Jumlah penduduk wilayah seluruh daerah

Hasil uji Indeks Williamson menunjukkan kriteria sebagai berikut.

- Mendekati 0-0,34 termasuk tingkat kesenjangan rendah
- Antara 0,35-0,80 termasuk tingkat kesenjangan sedang
- Di atas 0,80 termasuk tingkat kesenjangan sangat tinggi

Dengan berbagai cara yang berbeda, untuk memahami tingkat ketimpangan atau pemerataan regional dapat dilakukan dengan analisis *performance* ekonomi antar daerah dengan mengklasifikasikannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Atas dasar dua variabel tersebut, dengan menggunakan nilai rata-ratanya, pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan pertum-

bahan ekonomi rendah (*low income low growth*), daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi (*low income high growth*), daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi (*high income low growth*), daerah yang memiliki tingkat pendapatan perkapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi (*high income high growth*).

Dengan cara yang sama masih ada pendekatan lain yang dapat digunakan untuk memahami struktur pertumbuhan ekonomi sebagai analisis. Melalui analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu: Daerah bertumbuh cepat (*rapid growth region*), Daerah tertekan (*retarded region*), Daerah sedang bertumbuh (*growing region*), Daerah relatif tertinggal (*backward region*). (Sjahfrizal, 1997)

b. Indeks Theil

Indeks Entropi Theil (*Theil entropy index of inequality*) pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Kelemahan utama indeks lain yang mengukur konsentrasi/dispersi secara spasial adalah bahwa mereka hanya menyajikan satu nilai tunggal pada satu titik waktu. Telah lama diketahui bahwa setiap indeks didesain untuk berbagai tujuan dan berdasarkan beberapa asumsi penting.

Tidak seperti indeks-indeks yang lain, indeks theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu dan menyediakan secara rinci dalam sub-unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mendiskripsikan yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial, sebagai contoh kesenjangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub-unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2002).

Indeks Entropi Theil menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan indeks konsentrasi spasial yang lain. Keunggulan utama ini adalah bahwa pada suatu titik waktu, indeks ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi (dispersi) distribusi spasial pada sejumlah daerah dan sub-daerah dalam

suatu negara. Barangkali karakteristik yang paling signifikan dari indeks entropi adalah bahwa indeks ini dapat membedakan kesenjangan “antar daerah” (*between-region inequality*) dan kesenjangan “dalam satu daerah” (*within-region-region inequality*). Lebih Khusus lagi dalam konteks Indonesia, indeks tersebut dapat dinyatakan dalam:

$$I(y) = \sum_{i=1}^N Y_i \log \frac{Y_i}{N} \quad (1)$$

Di mana:

- $I(y)$ = Indeks ketimpangan regional keseluruhan atas kesenjangan spasial Indonesia;
- Y_i = Pangsa propinsi i terhadap total tenaga kerja industri manufaktur Indonesia;
- N = Jumlah keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia.

Untuk mengukur kesenjangan spasial antar pulau di Indonesia, kita dapat memilah persamaan 1 ke dalam:

$$I(y) = \sum_{r=1}^R Y_r \log \frac{Y_r}{N_r / N} + \sum_{r=1}^R Y_r \left[\sum_{i \in 1}^{Y_r} \frac{y_i}{Y_r} \log \frac{y_i / Y_r}{N_r} \right] \quad (2)$$

Di mana:

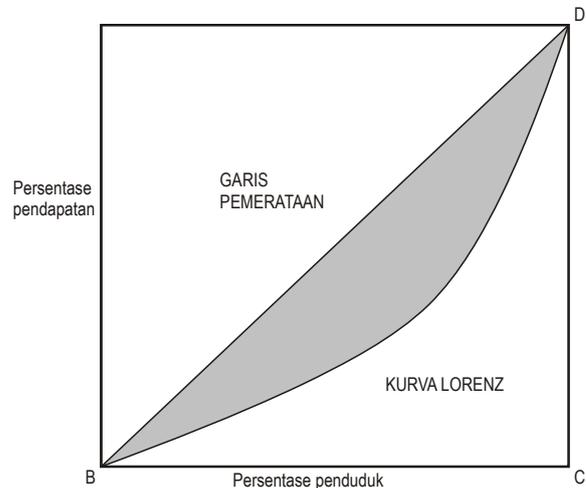
- Y_r = Pangsa semua di dalam pulau;
- N_r = Jumlah di dalam Propinsi dalam pulau;
- R = Jumlah keseluruhan pulau-pulau utama di Indonesia.

Bagian pertama dalam persamaan 2 adalah mengukur derajat kesenjangan tenaga kerja menurut pangsa pulau di Indonesia, sedangkan bagian kedua mengukur derajat perbedaan dalam pangsa provinsi dalam masing-masing pulau yang di beri bobot dengan pangsa keseluruhan pulau di Indonesia. Indeks entropy termasuk dekomposisi ke dalam kesenjangan spasial antar pulau dan dalam satu pulau. Nilai indeks entropy yang lebih rendah berarti menunjukkan adanya kesenjangan yang rendah, dan sebaliknya (Kuncoro, 2002).

c. Indeks Gini / Koefisien Gini

Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis

diagonal dan kurva Lorentz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva Lorentz itu berada. Pada gambar 1, rasio yang dimaksud adalah perbandingan bidang A terhadap total segitiga BCG. Rasio inilah yang dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini (*Gini concentration ratio*) yang seringkali disingkat dengan istilah *Koefisien Gini* (*Gini coefficient*). Koefisien Gini adalah kurva yang mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Walaupun kemungkinannya sangat kecil bahwa tingkat pemerataan akan mencapai angka 0 dan juga kecil kemungkinannya tingkat ketimpangan akan mencapai angka 1.



Gambar 1: Perkiraan Koefisien Gini

Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan pendapatan di kalangan penduduknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal relatif paling baik (paling merata), berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Koefisien Gini merupakan informasi yang bermanfaat untuk menunjukkan tingkat dan perubahan distribusi pendapatan berdasarkan bentuk-bentuk kurva Lorentz yang ada di masa lalu dan saat ini (Todaro, 2000).

Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berkaitan

dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah, seperti penggunaan sumber daya lokal yakni tenaga kerja dan bahan baku yang menghasilkan kekayaan daerah dan dapat menciptakan peluang kerja (*job creation*). Teori basis ekonomi dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan apakah suatu sektor atau industri merupakan sektor/industri basic atau non basic. Untuk menentukan suatu sektor basic atau non basic melalui pendekatan *Location Quotient* (Arsyad, 1999).

Location Quotient (LQ) adalah teknik yang untuk mengidentifikasi atau mengukur konsentrasi industri perekonomian lokal dibandingkan dengan perekonomian yang lebih luas. Nilai $LQ > 1$ artinya perekonomian lokal atau daerah mempunyai spesialisasi atas industri tersebut dibandingkan perekonomian yang lebih luas. Sebaliknya nilai $LQ < 1$ maka suatu daerah tidak memiliki spesialisasi atas suatu industri (Blakely, 2002), (Hayter, 2000), (Hoover, 1971).

Semakin tinggi permintaan barang dan jasa dari suatu daerah tertentu, maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah harus berusaha untuk mengembangkan spesialisasinya agar dapat memperoleh pendapatan yang tinggi dari peningkatan penjualan barang dan jasa ke luar daerah. Selain itu dengan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa ini, maka dengan sendirinya setiap daerah akan dapat menciptakan lapangan kerja.

Penelitian Terdahulu

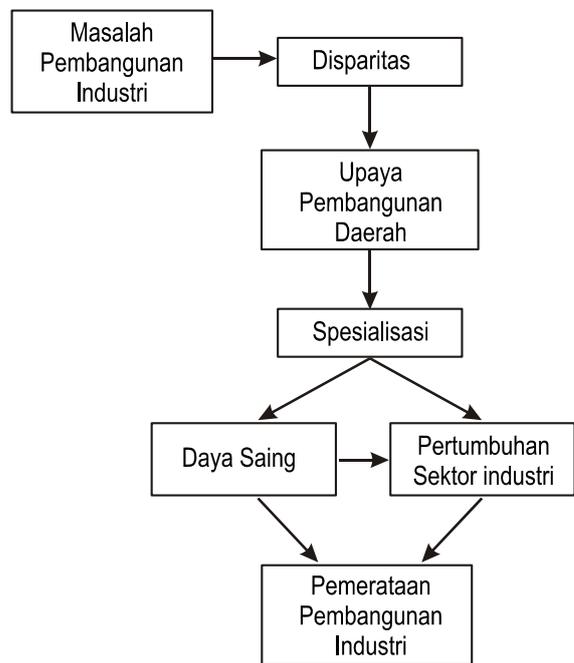
Yunita (2006) melakukan penelitian di Jawa Tengah tentang disparitas industri dengan tahun pengamatan 2001–2003. Alat analisis yang digunakan Indeks Theil, Indeks Spesialisasi Regional dan Koefisien Lokasi Gini. Hasil penelitiannya Di Jawa Tengah terjadi ketimpangan tenaga kerja Industri Manufaktur.

Suharto (2002) melakukan penelitian di Indonesia tentang disparitas industri dengan tahun pengamatan 1993–1996. Alat analisis yang digunakan Indeks Theil, Indeks Spesialisasi Regional, Koefisien Lokasi Gini dan koefisien Gini. Hasil penelitiannya berdasarkan indeks Theil menunjukkan ketimpangan antar pulau utama mendominasi

ketimpangan total di Indonesia. Ketimpangan antar pulau menyumbang rata-rata lebih dari 95%.

Soepono (2001) melakukan penelitian di Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan tahun pengamatan 1999. Alat analisis yang digunakan Location Quotient. Hasil penelitiannya dengan menggunakan alat analisis LQ, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sektor listrik, gas dan air, bangunan, perdagangan/hotel, pengangkutan, keuangan/asuransi dan jasa kemasyarakatan merupakan sektor basis. Sektor pertanian, tambang dan penggalian serta industri adalah sektor-sektor non basis.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2: Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang bersumber dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya data tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, jumlah perusahaan, nilai tambah sektor manufaktur besar dan sedang Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan menggunakan data industri manufaktur ISIC dua digit.

Definisi Operasional Variabel

1. Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri manufaktur besar dan sedang dengan pengelompokan ISIC 2 digit.
2. Jumlah perusahaan industri manufaktur adalah jumlah perusahaan industri manufaktur yang dikelompokkan menurut kelompok industri di kabupaten/kota.
3. Industri manufaktur besar dan sedang adalah industri manufaktur yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20–99 dan yang lebih besar atau sama dengan 100 orang .
4. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dikurangi nilai input.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk estimasi dan pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Theil)

Alat analisis ini untuk mengukur ketimpangan regional antar kabupaten/kota pada sektor industri manufaktur di Jawa Tengah. Secara umum diakui bahwa perdagangan mendorong terjadinya konsentrasi aktivitas industri manufaktur secara geografis (Kuncoro, 2001). Krugman (1991) juga mengemukakan bahwa secara sistematis terjadi pemusatan aktivitas manufaktur secara spasial, sehingga spesialisasi membawa implikasi ketimpangan distribusi aktivitas manufaktur secara spasial. Untuk mengukur ketimpangan sektor manufaktur (pola konsentrasi) regional digunakan indeks ketimpangan Theil dengan rumusan sebagai berikut (Kuncoro, 2002: 89)

$$I(y) = \sum_{i=1}^N Y_i \log \frac{Y_i}{N} \quad (3)$$

Di mana:

- $I(y)$ = Indeks ketimpangan regional untuk seluruh Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah,
- Y_i = Pangsa penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur Kabupaten/Kota terhadap Jawa Tengah,
- N = Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Indeks ketimpangan Theil dapat didekomposisi sesuai tujuannya. Dalam kasus ini digunakan untuk mendeteksi ketimpangan di dalam Karesidenan maupun antar Karesidenan, sehingga indeks dekomposisi sebagai berikut:

$$I(y) = \sum_{r=1}^R Y_r \log \frac{Y_r}{N_r / N} + \sum_{r=1}^R Y_r \left[\sum_{i \in 1} \frac{Y_i}{Y_r} \log \frac{Y_i / Y_r}{N_r} \right] \quad (4)$$

(Mudrajad Kuncoro, 2002: 89)

Dimana:

- Y_r = Pangsa tenaga kerja semua Kabupaten/kota di dalam Karesidenan
- N_r = Jumlah Kabupaten/kota di dalam Karesidenan
- R = Jumlah keseluruhan Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.

Bagian pertama dalam persamaan 4 (bagian kiri/*first term*), mengukur derajat ketimpangan antar karesidenan, sedangkan bagian kedua (persamaan sebelah kanan/*second term*) mengukur derajat ketimpangan antar kabupaten di dalam karesidenan. Nilai indeks semakin rendah berarti ketimpangan yang rendah atau sebaliknya.

a. Indeks Spesialisasi Regional

Untuk mengidentifikasi spesialisasi industri manufaktur besar dan sedang digunakan indeks spesialisasi regional. Indeks ini lazim digunakan dalam melihat spesialisasi regional. Pada dasarnya indeks ini merupakan alat ukur yang disebut analisis location quotient (LQ). Jika indeks spesialisasi regional nilai lebih dari satu (>1), berarti sektor /industri tersebut memiliki daya saing dibanding industri sejenis pada wilayah yang dijadikan pembanding, misalnya provinsi terhadap negara dan sebagainya. indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$R_{ij} = [E_{ij} / \sum_i E_{ij}] / [\sum_j E_{ij} / \sum_i \sum_j E_{ij}] \quad (5)$$

Dimana:

- R_{ij} = Koefisien spesialisasi regional;
- E_{ij} = Kesempatan kerja di kelompok industri manufaktur i di daerah j ;
- $\sum_i E_{ij}$ = Total kesempatan kerja sektor manufaktur di daerah j ;
- $\sum_j E_{ij}$ = Total kesempatan kerja dikelompok industri manufaktur i di seluruh Jawa

Tengah.

$\sum_i \sum_j E_{ij}$ = Total kesempatan kerja sektor manufaktur di seluruh Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Industri Manufaktur Besar dan Sedang

Tahun 2001 yang menduduki tiga peringkat atas masing-masing kota Semarang (13,58%), kabupaten Kudus (11,71%) dan kabupaten Semarang (9,20%). Tahun 2003, kota Semarang dan kabupaten Kudus dan Kabupaten Semarang tidak bergeser pada posisinya masing 13,89% dan 12,41% pada peringkat pertama dan kedua. Peringkat ketiga diduduki oleh kabupaten Semarang (8,92%). Tahun 2006 posisi tiga besar tidak bergeser dari tahun-tahun sebelumnya masing-masing 12,75%, 12,13%, 9,97% untuk kota Semarang, kabupaten Kudus, kabupaten Semarang. Gambaran distribusi IBM di Propinsi Jawa Tengah dilihat dari tenaga kerja dapat dikatakan terkonsentrasi pada tiga kabupaten/kota yaitu kota Semarang, kabupaten Kudus dan kabupaten Semarang (gambar 1)

Aspek lain untuk melihat distribusi IBM adalah sumbangan nilai tambah (*value added*) dari keberadaan sektor manufaktur tersebut. Nilai tambah adalah selisih dari nilai output sektor manufaktur dikurangi dengan biaya inputnya (bahan baku). Ditinjau dari sumbangan nilai tambah sektor manufaktur besar dan menengah, juga terjadi pemusatan di daerah-daerah tertentu.

Tahun 2001, tiga besar penyumbang nilai tambah untuk IBM di Propinsi Jawa Tengah adalah kota Kudus (18,47%), kota Semarang (14,90%), kabupaten Sragen (14,86%). Tahun 2003, ada perubahan untuk kabupaten/kota yang semula nilai tambahnya tertinggi namun secara prosentase berkurang, yang disebabkan telah diberlakukannya otonomi daerah meskipun tidak semua kabupaten/kota sumbangan nilai tambahnya turun. Hal yang menarik pada tahun 2003, kabupaten Sragen justru mengalami penurunan nilai tambah yang semula 14,86% menjadi 1,75%. Penurunan ini diperoleh dari sub sektor barang galian bukan logam dan industri kayu, bambu, rotan dan sejenisnya yang mengalami penurunan drastis. Posisi ketiga kabupaten Sragen yang mengalami penurunan digantikan oleh kabupaten Semarang, pada tahun 2006 Kabupaten Kudus

mengalami penurunan yang sangat drastis terutama nilai tambah untuk industri tekstil, pakaian jadi dan kulit. Kabupaten Kudus persentase nilai tambah IBM menjadi 13,47% menduduki urutan kedua. Urutan pertama, kota Semarang mengalami kenaikan menjadi 25,38%. Kenaikan nilai tambah kota Semarang disebabkan sub sektor andalan yaitu industri makanan, minuman, pakaian jadi, dan juga kontribusi industri kertas dan barang dari kertas, percetakan (gambar 2). Kabupaten Kudus dan kota Semarang tampak menonjol dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Distribusi Industri Manufaktur di Jawa Tengah dengan menggunakan Indeks Theil dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

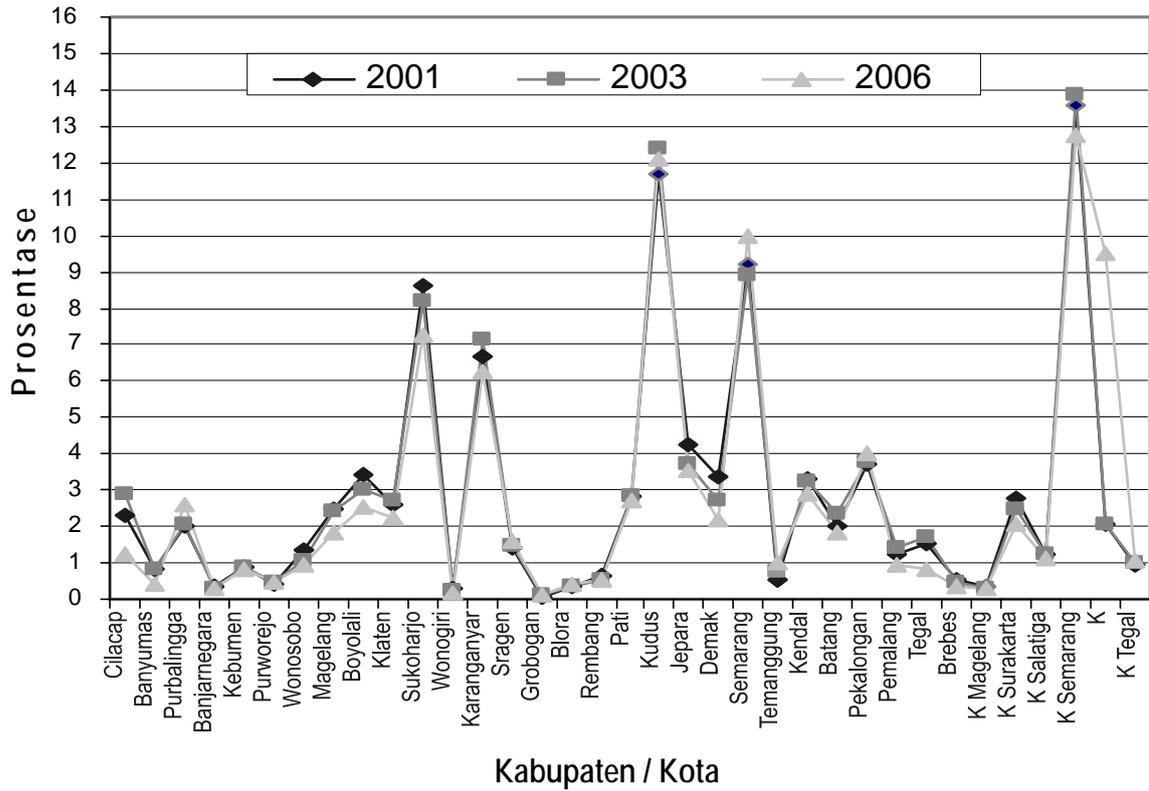
Tabel 1. Indeks Kesenjangan Industri Manufaktur di Jawa Tengah

Tahun (1)	Antar Karesiden (2)	Dlm Karesidenan (3)	Total (4)	Pangsa (5)
2001	2,06	0,15	2,21	0,93
2003	2,20	0,18	2,39	0,92
2006	2,03	0,19	2,22	0,91

Sumber: Data sekunder diolah

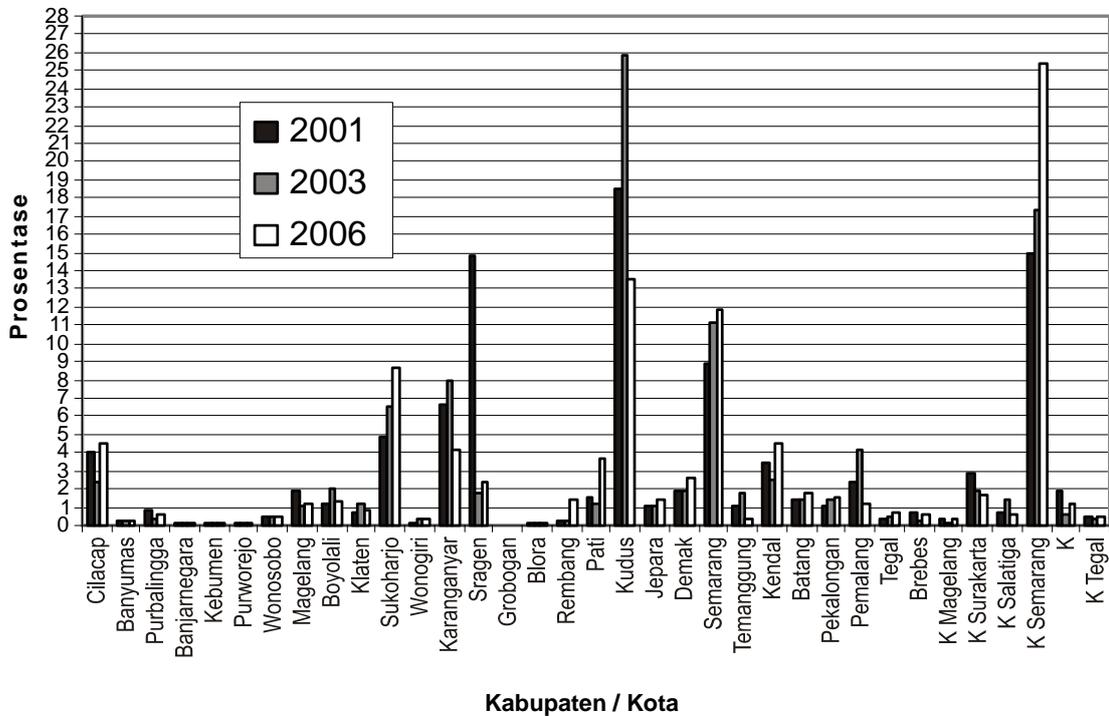
Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antar karesidenan lebih dominan, yaitu menyumbang sekitar 93% dari total kesenjangan dibandingkan kesenjangan dalam karesidenan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Kuncoro (2002) yang menghasilkan kesimpulan kesenjangan industri antar pulau di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kesenjangan dalam pulau (antar Propinsi). Nilai indeks kesenjangan antar karesidenan berkisar antara 2,03 sampai dengan 2,20. Kesenjangan antar karesidenan yang besar, merupakan indikasi terkonsentrasinya aktivitas manufaktur di karesidenan-karesidenan tertentu.

Berdasarkan nilai indeks Theil, untuk kesenjangan dalam karesidenan (tabel 2), karesidenan Semarang mempunyai nilai terbesar dibandingkan karesidenan lainnya. Hal ini disebabkan Kabupaten/kota yang berada di karesiden Semarang dilihat pangsa distribusi tenaga kerja industri manufaktur terhadap total tenaga kerja industri manufaktur Jawa Tengah telah terjadi kesenjangan.



Sumber : BPS, Survey IBM, diolah

Gambar 1. Distribusi IBM Menurut Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Tengah 2001 - 2006



Sumber : BPS, Survey IBM, data diolah

Gambar 2 Distribusi IBM Menurut Nilai tambah di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 - 2006

Tabel 2. Kesenjangan Industri Manufaktur dalam Karesidenan

Tahun	Banyumas	Kedu	Surakarta	Pati	Semarang	Pekalongan
2001	0,0046	0,0064	0,0313	0,0435	0,0576	0,0099
2003	0,0064	0,0054	0,0325	0,0480	0,0545	0,0348
2005	0,0064	0,0035	0,0278	0,0462	0,0599	0,0412

Sumber: Data sekunder (diolah)

Spesialisasi Industri Manufaktur Besar dan Sedang

Spesialisasi industri pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2001–2006 dihitung dengan menggunakan indeks spesialisasi regional seperti pada persamaan-1. Gambaran spesialisasi industri kabupaten/kota menunjukkan di mana aktivitas ekonomi yang menonjol dari sudut tenaga kerja didominasi oleh industri makanan, minuman (ISIC 15), industri tekstil (ISIC 17), industri kayu, barang-barang dari kayu dan anyaman (ISIC 20) serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia (ISIC 24). Hasil penelitian ini sejalan dengan Kuncoro (2002) bahwa di Jawa Tengah, Semarang *Extended Industrial Areas* (EIA) dan Surakarta EIA memiliki pola struktur industri yang relatif sama. Industri tekstil-pakaian-sepatu dan industri makanan di kedua daerah ini memainkan peranan penting. Perbedaannya yaitu bahwa pangsa tenaga kerja industri kayu dan furnitur lebih menonjol di Semarang EIA, sedang pangsa industri kimia lebih substansial di Surakarta EIA.

Temuan lain dari indeks tersebut adalah masih ada beberapa industri yang sangat jarang sekali menjadi spesialisasi industri daerah yaitu industri batu bara, pengilangan minyak bumi, nuklir (ISIC 23), logam dasar (ISIC 27) dan radio, televisi dan peralatan komunikasi (ISIC 32) dan kendaraan bermotor (ISIC 34).

Tahun 2001 yang menjadi daerah industri adalah kabupaten Kudus, kabupaten Semarang, kabupaten Karanganyar dan kota Semarang. Kabupaten Kudus mempunyai spesialisasi pada sub sektor industri tembakau (ISIC 16), industri kertas (ISIC 21), industri penerbitan, percetakan (ISIC 22), dan industri radio, televisi (ISIC 32). Sedangkan Kota Semarang mempunyai spesialisasi pada industri industri penerbitan, percetakan (ISIC 22), dan industri logam dasar (ISIC 27). Tahun 2003 yang menjadi daerah industri pertama, kota Semarang

dengan spesialisasi pada industri kimia (ISIC 24), industri logam dasar (ISIC 27) dan industri barang dari logam (ISIC 28), industri pakaian jadi (ISIC 18), industri kulit (ISIC 19), industri kertas (ISIC 21) dan alat-alat angkutan (ISIC 35). Kedua, kabupaten Kudus dengan spesialisasi pada industri tembakau (ISIC 16) dan industri kertas (ISIC 21), industri penerbitan (ISIC 22) serta industri radio, televisi (ISIC 32). Hal ini karena didukung oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pura Barutama yang bergerak di industri kertas dan percetakan, PT Djarum Kudus di industri rokok dan Pabrik radio dan televisi yang produknya berlabel Polytron.

Daerah industri berikutnya adalah Kabupaten Sukoharjo memiliki spesialisasi industri tekstil (ISIC 17), pakaian jadi (ISIC 18) industri kertas (ISIC 21) dan industri kimia (ISIC 24). Keempat, kabupaten Semarang dengan spesialisasi pada industri tekstil (ISIC 17) dan industri daur ulang (ISIC 37). Tahun 2006 untuk spesialisasi di daerah industri selain kabupaten Karanganyar tidak banyak perubahan. Kabupaten Karanganyar mempunyai spesialisasi pada industri tekstil (ISIC 17), industri kimia (ISIC 24) pada tahun 2003, industrinya mengalami penurunan dalam hal nilai tambahnya sehingga tidak masuk kategori daerah industri sesuai kriteria. Hasil penemuan lainnya adalah spesialisasi daerah industri yang letaknya berdekatan mempunyai kesamaan.

SIMPULAN

Disparitas industri manufaktur besar dan sedang pada kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan ketidakmerataan baik dilihat dari grafis maupun dengan indeks Theil. Hasil identifikasi spesialisasi industri pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa aktivitas industri yang menonjol adalah industri makanan, minuman (ISIC 15), industri tekstil (ISIC 17), industri kayu, barang-barang dari kayu dan anyaman (ISIC 20) serta industri kimia dan barang-barang dari bahan

kimia (ISIC 24). Spesialisasi industri di daerah industri yang lokasinya berdekatan mempunyai kesamaan spesialisasi. Kota Semarang dan sekitarnya (Kabupaten Semarang dan Kudus) mempunyai spesialisasi industri pakaian jadi (ISIC 18) dan penerbitan, percetakan (ISIC 22). Kota Surakarta sekitarnya (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar) mempunyai spesialisasi industri tekstil (ISIC 17), pakaian jadi (ISIC 18) dan kimia (ISIC 24).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Amirudin, 1992, *Analysis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analysis of the Inpres Project on Indonesian Development*, *Disertation*, Unpublished, The Faculty of The University of Pennsylvania.
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2001–2006, *Survey Industri Besar dan Menengah tahunan*.
- Blakely, Edward, 2002, *Planning Local Economic Development Theory and Practice*, New Delhi: Sage Publication
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga
- Hayter, Roger, 2000, *The Dynamics of Industrial Location: The Factory, The Firm and The Production System*, Chichester: John Wiley & Son.
- Hoover, Edgar, M, 1971, *An Introduction to Regional Economics*, New York: Alfred A, Knopf, Inc.
- Isard, W, 1975, *Introduction to Regional Science*, Prentice- Hall, inc. Englewood, New Jersey
- Krugman, P, 1980, *“Scale Economies, Product Differentiation and The Pattern of Trade”*, *American Economic Review*, 70, 950–9.
- Krugman, P, 1991, *Geography and Trade*, Mass, Cambridge: MIT Press.
- Kuncoro, M, 2002, *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, Yogyakarta: AMP YKPN
- Syafrizal, 1997, *“Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat”*, Prisma, 3 Maret.
- Shields, Martin, 2003, *“Tool 3 Use Location Quotients to Identify Local Strengths, Opportunities and Industry Clusters”* Cardi Cornell. www.cardi.cornell.edu/.
- Suharto, 2002, *“Disparitas dan Pola Spesialisasi Kesempatan Kerja Industri Manufaktur Regional Indonesia”*, *Tesis*, Program Studi IESP PPS-UGM Yogyakarta, Tidak dipublikasikan.
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Theil, Henry, 1967, *Economic sand Information Theory*, Amsterdam: North Holland Publishing Company.
- Tulus T H Tambunan, 2001, *Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yunita, Vina, 2006, *“Disparitas dan Pola Spesialisasi Kesempatan Kerja Industri Manufaktur di Jawa Tengah”*, *Skripsi*, STIE Stikubank, Semarang, Tidak dipublikasikan.